

KEBIJAKAN PEMANTAUAN PERSAINGAN USAHA BAGI USAHA MENENGAH DAN BESAR: KASUS PULAU BATAM DAN KOTA MAKASSAR

LIA WARLINA

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Komputer Indonesia

Tujuan dari kajian ini adalah untuk *mereview* implikasi kebijakan persaingan usaha dari usaha menengah dan besar. Iklim usaha yang kondusif diharapkan dapat menarik investor dalam dan luar negeri. Wilayah kajian adalah Pulau Batam dan Kota Makassar. Hasil studi menunjukkan bahwa penurunan jumlah perusahaan menengah dan besar terjadi pada era tahun 1996-1998. Pemulihan ekonomi mengakibatkan jumlah perusahaan menengah dan besar meningkat di tahun 1999 dan 2000, tetapi jumlah ini menurun lagi pada tahun 2001 dan 2002. Hasil ini berlawanan dengan total output nasional yang selalu meningkat dari tahun 1996 sampai tahun 2002. Potensi investasi di Indonesia relatif rendah, walau demikian pemerintah berusaha menetapkan kebijakan untuk mendorong iklim usaha yang kondusif seperti paket kebijakan ekonomi, dan regulasi anti monopoli. Kebijakan ini diikuti dengan peraturan pemerintah yang meliputi struktur, perilaku dan kinerja pasar. Survey di dua lokasi menunjukkan kebijakan persaingan usaha belum diimplementasikan di dua wilayah tersebut. Kebijakan daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : kebijakan persaingan usaha, daya saing, usaha menengah dan besar.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan berakhirnya periode pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama 30 tahun. Krisis ekonomi yang kemudian dampaknya bersifat multidimensi menimbulkan depresi yang berkepanjangan secara umum terhadap prospek perkembangan dunia usaha dan ketenagakerjaan, dan khususnya terhadap perkembangan investasi. Pemulihan ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2001, tetapi berjalan lambat dan belum mencapai tingkat pertumbuhan yang

ajeg dan memadai seperti yang diharapkan mendekati kondisi sebelum krisis.

Peranan kelengkapan infrastruktur cukup menentukan dalam mendukung kegiatan usaha. Adanya krisis ekonomi ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur banyak tertunda, yang berdampak pada menurunnya minat investor untuk berusaha di Indonesia. Hal ini merupakan kendala utama dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan perkiraan dari Bappenas (2003) di Indonesia terdapat kesenjangan dana (*financial gap*) sebesar Rp 267 triliun (US\$31 miliar) untuk pembangunan infrastruktur pada periode 2005-2009. Jadi untuk lima tahun ke

depan ketersediaan sarana dan prasarana tidak cukup optimal untuk memajukan perekonomian kita.

Selain hal tersebut di atas, terdapat perusahaan-perusahaan menengah besar dan strategis yang mampu memberikan andil yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada masa sebelum krisis telah mengalami kelumpuhan. Sebagian lainnya dinyatakan pailit baik karena faktor intern antara lain *mismanagement*, maupun karena faktor ekstern seperti kehilangan fasilitas dan kondisi pemerintahan yang tidak menguntungkan. Meskipun demikian, ada sejumlah perusahaan menengah besar lainnya yang mampu terus bertahan dan bahkan beberapa diantaranya menunjukkan tendensi pertumbuhan yang berarti. Sejumlah perusahaan yang dapat bertahan tersebut diduga kuat telah memiliki daya tahan yang tinggi dalam persaingan pasar yang ketat. Upaya pemulihan ekonomi harus disertai dengan upaya optimal dengan mendorong perusahaan-perusahaan menengah besar dan strategis yang masih berjalan untuk melakukan daya saing dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan daya saing dan regional termasuk mengantisipasi persaingan yang tajam sejalan dengan diberlakukannya AFTA 2003.

Persaingan usaha di masa depan akan lebih diwarnai oleh persaingan kualitas produk dan/atau jasa, kecepatan, harga serta kualitas pelayanannya. Dengan demikian perusahaan harus mampu menawarkan produk dan layanan dengan nilai lebih, sejalan dengan tuntutan konsumen yang terus berubah. Bila perusahaan telah memenangkan persaingan kualitas produk dan layanan tidak menjamin perusahaan tersebut akan berkembang cepat. Faktor eksternal seperti misalnya peraturan, kebijakan dan infrastrukturpun menjadi faktor yang menentukan. Untuk memberikan kondisi kondusif bagi kegiatan usaha maka pemerintah telah menggariskan kebijakan yang mengatur kegiatan usaha tersebut.

Tujuan studi ini adalah mengkaji

konsep persaingan usaha dan daya saing, perkembangan usaha menengah dan besar di Indonesia serta kasus persaingan usaha menengah dan besar di Pulau Batam dan Kota Makassar.

KONSEP PERSAINGAN USAHA DAN DAYA SAING

Persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya ekonomi pasar. Pasar persaingan sempurna secara absolut hanya terdapat dalam teori, sedangkan pasar monopoli dan oligopoli justru sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Putong, 2002): a) pembeli dan penjual sangat banyak, b) jumlah barang yang diperjualbelikan banyak dan seragam (homogen), c) bebas keluar dan masuk bagi pengusaha, d) pengetahuan pembeli dan penjual mengenai pasar relatif sempurna, dan e) mobilitas sumber-sumber ekonomi cukup sempurna.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan suatu perusahaan memonopoli pasar komoditi tertentu, antara lain sumberdayanya eksklusif, skala ekonomi atau monopoli alamiah, kebijakan pemerintah yang cenderung eksklusif pada pihak tertentu, dan 4) keterbatasan aspek legalitas yang mengatur tentang persaingan usaha. Persaingan monopoli dalam banyak kasus banyak tidak disukai dalam praktek ekonomi, karena perusahaan pemegang monopoli dapat bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat dalam menentukan harga.

Daya saing merupakan syarat keharusan agar industri mampu bersaing pada pasar domestik dan pasar global. Pada era perdagangan bebas saat ini terdapat konsekuensi yang dihadapi Indonesia dalam kaitannya dengan daya saing yaitu: a) modal asing masuk disertai anak-anak cabangnya, b) percepatan inovasi produk dan diversifikasi pemasaran, c) peningkatan kompetisi pasar domestik dan investasi ke luar negeri.

Konsekuensi di atas menyebabkan daya saing (*competitive advantage*) merupakan suatu keharusan agar perusahaan dapat bertahan. Tetapi, bila melihat perkembangan sejak 1996, Indeks daya saing Indonesia mengalami keterpurukan dan masih terus berlangsung hingga tahun 2003. Seperti yang ditunjukkan oleh laporan *World Economic Forum* (WEF), Indonesia terendah di antara negara ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan oleh korupsi, birokrasi yang tidak efisien, ketidakstabilan politik, akses kredit yang terbatas, peraturan perpajakan, tarif pajak. (Primiana, 2004)

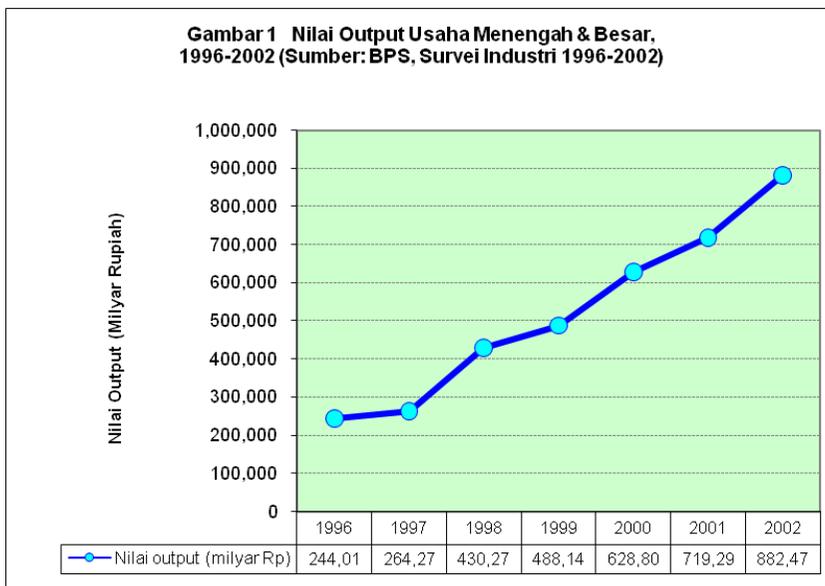
Menurut Soesastro (2004) cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi adalah dengan adanya kebijakan liberalisasi perdagangan (dan investasi). Adanya pemikiran yang mengatakan bahwa peningkatan daya saing terutama merupakan tantangan bagi masing-masing perusahaan dan upaya yang dilakukan haruslah pada tingkat perusahaan. Kerjasama internasional, misalnya dengan membentuk suatu aliansi strategis (*strategic alliance*), merupakan salah satu cara yang kini banyak dilakukan, terutama antara perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju. Tetapi berbagai bentuk kerjasama internasional juga dilakukan

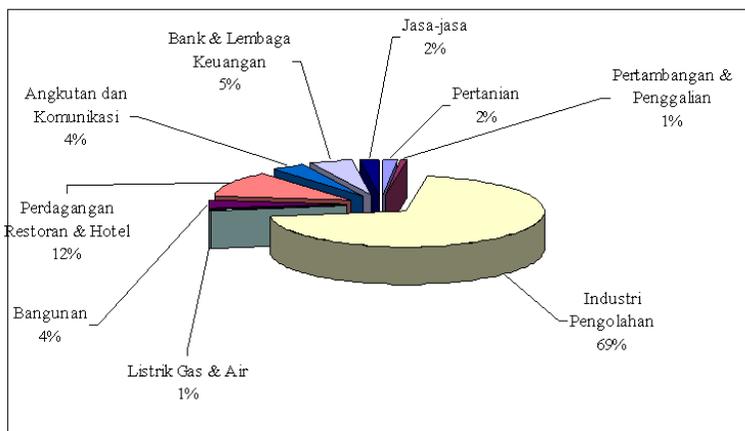
pada tingkat negara (ekonomi) untuk meningkatkan daya saing, artinya meningkatkan kemampuan penetrasi pasar. Pembentukan kawasan perdagangan bebas (FTA) seringkali dilihat sebagai upaya untuk saling meningkatkan akses pasar di antara pesertanya.

Perkembangan Usaha Menengah Besar

Kriteria industri (usaha) menengah besar berdasarkan kriteria dari Badan Pusat Statistik hanya berdasarkan pada jumlah tenaga kerja saja. Usaha (menengah) adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20-99 orang. Industri besar adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 orang. (BPS, 2001). Sedangkan Bank Indonesia menggolongkan usaha kecil, menengah dan besar berdasarkan nilai aset perusahaan dan omset tahunan.

Gambar 1 adalah perkembangan nilai output usaha menengah & besar selama 1996-2002. Perkembangan nilai output menunjukkan pola yang agak berbeda dengan perkembangan jumlah perusahaan-perusahaan tersebut. Jumlah perusahaan dari tahun 1996 - 2002 cenderung fluktuatif dan bahkan menurun pada permulaan tahun 2000an, nilai output





Gambar 2

Distribusi Persentase PDRB Batam atas harga berlaku tahun 2002 (BPS, 2002)

dari perusahaan usaha menengah & besar justru mengalami peningkatan selama periode 1997-2002.

Kenaikan nilai output secara nominal harus dikaji secara hati-hati, karena kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh depresiasi nilai mata uang rupiah, yang pada gilirannya hal ini mempunyai kaitan erat dengan laju inflasi. Nilai tukar rupiah pernah mencapai angka di atas Rp. 10.000 untuk setiap dollar AS, bahkan nilai ini pernah mendekati Rp.15.000 pada saat krisis ekonomi memberikan dampak terbesarnya pada semester terakhir tahun 1998. Tingkat pertumbuhan ekonomi; konsekuensinya, depresiasi 13% pada tahun 1997-1998. Begitu juga dengan laju inflasi yang mencapai hampir 98% pada tahun 1998. Oleh karena itu, kenaikan nilai output nominal tersebut, khususnya pada tahun 1997-1999, tidak murni mengindikasikan suatu peningkatan kinerja dari sektor industri bagi perekonomian

Pulau Batam

Pulau Batam memiliki delapan kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 549.951 jiwa. Produk Domestik Regional Bruto dari Batam disajikan pada Gambar 2 berikut. Sumbangan terbesar terhadap pendapatan regional diberikan oleh sektor industri yaitu sebesar 69%. Hal

ini memang sesuai dengan tujuan dari pengembangan Pulau Batam yang diperuntukan untuk kawasan perindustrian.

Sektor industri yang demikian dominan di Batam ini lebih didominasi oleh perusahaan besar yang berjumlah 118 perusahaan, sedangkan perusahaan sedang atau menengah sejumlah 46 unit. Hal ini berakibat pada daya serap tenaga kerja yang lebih besar disediakan oleh perusahaan besar yaitu menyerap 81.965 orang sementara perusahaan menengah/ sedang menyerap 2.935 orang. (Tabel 1)

Perusahaan besar yang terbanyak adalah perusahaan yang bergerak di subsektor industri barang dari logam, mesin & peralatannya yang berjumlah 90 unit. Perusahaan besar di subsektor ini paling dominan dengan menyerap tenaga kerja sebesar 71.598 orang. Sektor industri ini sebagian besar produknya untuk ekspor. Tabel 2 berikut menggambarkan volume dan nilai FOB (*free on board*) dari komoditi yang diekspor dari Batam. Nilai yang paling besar dari beragam jenis komoditi ekspor dari Batam adalah komponen elektronika dan alat listrik yang bernilai 1,5 juta dolar Amerika.

Kota Makassar

Kota Makassar memiliki 14 kecamatan dengan jumlah penduduk pada

Tabel 1.
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja pada Industri Besar dan Sedang di Batam tahun 2001
(BPS, 2002)

Sektor Industri	Jenis Industri		Tenaga Kerja	
	Besar	Sedang	Besar	Sedang
Industri Makanan, Minuman & Tembakau	1	2	103	132
Industri Tekstil, Pakaian Jadi & Kulit	6	4	1.760	263
Kayu & barang dari kayu	1	1	317	94
Kertas, barang dari kertas, percetakan & penerbitan	5	1	3.279	90
Kimia, barang dari kimia, karet & plastik	13	5	4.112	285
Barang galian bukan logam	2	2	796	75
Barang dari logam, mesin & peralatannya	90	29	71.598	1.851
Lain-lain	0	2	0	145
Total	118	46	81.965	2.935

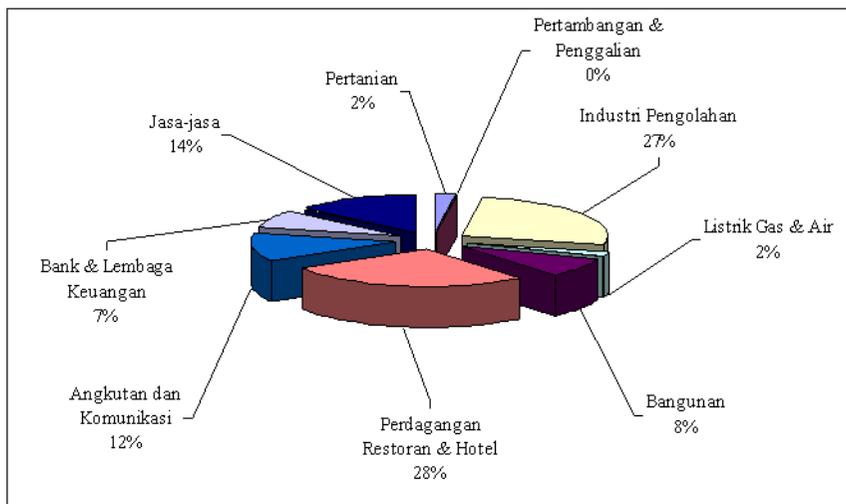
Tabel 2.
Volume dan Nilai Ekspor dari Komoditi di Batam (BPS, 2001)

Jenis Komoditi	Berat Bersih (Ton)	Nilai FOB (ribu US\$)
Komponen Elektronik	111,386	1,590.50
Alat Listrik	64,533	1,478.80
Komputer dan bagiannya	133,764	178.20
Audio Visual	7,269	121.00
Besi/Baja	38,693	69.40
Fotografi dan Optik	13,735	67.60
Damar Tiruan & Bahan Plastik	64,268	49.30
Suku Cadang Mesin	44,361	36.50
Suku Cadang Kendaraan	25,880	28.60
Kertas & Barang dari Kertas	31,969	28.10
Lainnya	2,151,165	223.00
Total	2,687,023	3,871.00

tahun 2000 yaitu 1.112.688 jiwa. Luas Kota Makassar adalah 175,77 km², jadi kepadatan penduduk adalah 6.333 jiwa per km². Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 28% dan industri yang menyumbang sebesar 27 %. Gambar 3 berikut menggambarkan distribusi

persentase PDRB atas harga dasar berlaku pada tahun 1999 (BPS, 2000).

Perdagangan dan perindustrian merupakan sektor dominan dalam menyumbang pada pendapatan domestik kota, karena itu sektor-sektor ini perlu dikaji keberadaan agar dapat lebih banyak menyerap investor baik dalam negeri



Gambar 3
Distribusi Persentase PDRB Kota Makassar atas harga berlaku tahun 1999 (BPS, 2000)

maupun pihak luar negeri. Pada tahun 2000 jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi sektor industri disajikan pada Tabel 3 berikut. Dari tabel di atas tampak bahwa jumlah unit usaha dari industri kecil dan menengah/ besar adalah seimbang yaitu jumlahnya masing-masing hampir 4000 unit. Hal yang berbeda terjadi pada jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri menengah/ besar adalah dua kali lipat daripada industri kecil. Hal yang sama terjadi pada nilai investasi dan nilai produksi yaitu pada industri menengah/ besar nilainya adalah dua kali lipat dari nilai pada industri kecil. Tabel di atas menggambarkan bahwa industri menengah/besar mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam perekonomian di Kota Makassar dibandingkan dengan industri kecil. Karena pengaruhnya besar, maka perlu ada suatu pemantauan dalam kebijakan yang mengatur tentang kegiatan usaha dalam sektor industri menengah/ besar.

PEMBAHASAN

Daya saing merupakan syarat keharusan agar industri mampu bersaing pada pasar domestik dan pasar global. Indonesia yang tengah mengalami krisis multidimensi harus berupaya sangat keras melakukan peningkatan daya saing yang dapat mendukung pengembangan industri agar tidak semakin tertinggal dengan negara lain. Kebijakan peningkatan daya saing yang dibahas dalam bab ini adalah paket kebijakan ekonomi dan undang-undang pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU no. 5 tahun 1999).

Memasuki era globalisasi sekarang Pemerintah Daerah menghadapi tantangan yang berat. Pemerintah Daerah perlu lebih memperhatikan aspek teknologi, kemampuan sumberdaya manusia dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi wilayah. Kebijakan yang konsisten dan aparat yang dapat dipercaya, adanya kerjasama antar daerah, administrasi dan birokrasi yang bersih, transparansi, akuntabilitas, dan kondisi ketertiban keamanan, serta berbagai

Tabel 3
Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Produksi pada Industri Kecil & Menengah/ Besar Kota Makassar tahun 2000 (BPS, 2000)

Sektor Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp Juta)	Nilai Produksi
				(Rp Juta)
<u>Industri Kecil</u>				
Ind. Logam, Mesin & Kimia	1.720	9.040	32.658	118.244
Ind. Aneka	501	5.611	11.016	36.996
Ind. Hasil Pertanian & Kehutanan	1.540	13.561	71.653	196.220
Jumlah Industri Kecil	3.761	28.212	115.327	351.460
<u>Industri Menengah/ Besar</u>				
Ind. Logam, Mesin & Kimia	75	2.228	37.789	34.141
Ind. Aneka	7	116	1.043	21.153
Ind. Hasil Pertanian & Kehutanan	124	12.925	105.033	268.948
Jumlah Industri Menengah/ Besar	206	15.269	143.865	324.242
Jumlah Total	3.967	43.481	259.192	675.702
Perbandingan Industri Besar terhadap Industri Kecil	1	2	2	2

produk yang bernilai tambah dapat meningkatkan daya saing usaha wilayah tersebut di pasar domestik dan internasional.

Salah satu alat ukur daya saing wilayah ini adalah dengan cara mengamati sudah sampai seberapa jauh luas wilayah pemasaran yang telah berhasil dijangkau. Ukuran luas wilayah penetrasi pasar akan digolongkan menurut :

- Luas wilayah pemasaran regional, yaitu yang mampu dijual di daerah pasaran lokal atau propinsi lain. Dengan kata lain jenis produk yang bersangkutan hanya memiliki peminat yang terbatas di daerah sendiri.
- Luas wilayah pemasaran nasional, yaitu yang mampu memperoleh pasaran secara nasional, yang berarti telah mampu bersaing dengan produk dan daerah lain di Indonesia, juga dapat ditafsirkan bahwa produk itu memiliki peminat yang lebih luas, dan

mempunyai nilai lebih tinggi dibanding pemasaran regional.

- Luas wilayah pemasaran nasional dan ekspor yaitu mampu dijual baik didalam negeri maupun mampu menjangkau pasaran ekspor. Jenis produk yang pasarannya lebih luas akan mempunyai peluang keberhasilan yang lebih besar bila mana diusahakan untuk dikembangkan.
- Luas wilayah pemasaran khusus ekspor yaitu jenis produk dengan nilai relatif paling besar dibandingkan dengan jenis produk di atas atas dasar pertimbangan bahwa jenis produk ini mampu menghasilkan devisa bagi negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk menumbuhkan daya saing wilayah maka pemerintah daerah harus melihat juga paradigma global yang meliputi customer, competitor dan company yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini mengandung arti pemerintah daerah harus

melihat bahwa konsumen berada di mana saja baik wilayah lokal, nasional maupun global. Hal yang sama juga adalah pesaing yang dapat berada di mana saja. Selanjutnya, pemerintah daerah sebagai company harus menetapkan standar-standar yang sama dengan standar yang diinginkan oleh masyarakat secara global. (Prasetyo, 2004).

KPPOD (2002) meneliti kebijakan daerah (Perda, SK Kepala Daerah dan sebagainya) yang berkaitan dengan daya tarik investasi seperti pajak, retribusi, dan pungutan lainnya di 134 kabupaten/ kota menunjukkan hanya sekitar 15% perda yang cukup mendukung terhadap daya tarik investasi. Salah satu aspek yang diteliti dari perda-perda yang berkaitan dengan iklim investasi adalah pelayanan perizinan terhadap dunia usaha. Sekitar 50% dari responden pelaku usaha menganggap bahwa pelayanan terhadap perizinan dunia usaha cukup baik.

Hasil survai terhadap wilayah kajian yang meliputi Pulau Batam dan Kota Makassar secara umum pemerintah daerah tersebut belum menurunkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemantauan daya saing. Secara umum berkaitan dengan kebijakan pemantauan daya saing yang meliputi paket kebijakan ekonomi dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang pelarangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, wilayah kajian belum menurunkan kebijakan secara eksplisit baik dalam bentuk peraturan daerah maupun surat keputusan kepala daerah. Peraturan daerah lebih kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PENUTUP

Hasil kajian memberikan gambaran adanya penurunan jumlah perusahaan pada perusahaan menengah besar selama periode krisis antara tahun 1996 dan 1998. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, jumlah perusahaan menengah besar meningkat pada tahun 1999 dan 2000, tetapi jumlah ini kembali menurun pada tahun 2001-02. Hal ini tidak sejalan dengan nilai output

yang terus meningkat dari tahun 1996 sampai dengan 2002.

Potensi investasi di Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain relatif rendah, tetapi pemerintah telah berusaha dengan menetapkan kebijakan untuk mendorong iklim usaha yang kondusif terutama bagi usaha menengah dan besar dengan menetapkan paket kebijakan ekonomi dan undang-undang anti-monopoli. Kebijakan ini perlu ditindaklanjuti dengan diterbitkan peraturan pemerintah yang akan lebih mempertimbangkan tiga faktor yaitu struktur, perilaku dan kinerja pasar. Sangat beralasan kiranya Pemerintah mengeluarkan UU No 25/ 2007 tentang Penanaman Modal.

Beberapa implikasi kebijakan dan rekomendasi dikemukakan dalam studi ini. Pertama, walaupun daya saing investasi di Indonesia masih relatif belum memadai dibandingkan dengan negara-negara tetangga, potensi untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di berbagai sektor sangat besar, yaitu dengan memberikan berbagai insentif (seperti pembebasan pajak pada awal berusaha) dan kepastian keamanan dan hukum, serta penyediaan infrastruktur yang handal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung angkatan kerja yang handal juga merupakan isu strategis dalam persaingan yang sangat kompetitif untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi diharapkan dapat mengkompensasi terhadap terus meningkatnya tuntutan kenaikan tingkat upah buruh, yang justru menjadi salah satu keuntungan kompetitif utama di negara-negara seperti Cina dan Vietnam. Kedua, investasi di sub-sektor industri besar/ sedang dengan menekankan teknologi padat karya masih dibutuhkan di masa mendatang untuk menampung angkatan kerja yang terus bertambah, dan sekaligus sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Survai pada dua wilayah kajian memberikan gambaran bahwa kebijakan persaingan usaha belum secara eksplisit diterapkan di daerah. Dua lokasi kajian

yaitu Pulau Batam dan Makassar masih tetap berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) (2001), *Indikator Industri Besar dan Sedang*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2000), *Makassar dalam Angka*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2002), *Batam dalam Angka*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewi, RR Ponco (2002), "Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Jabatan (Inservice Training) untuk Pengembangan Kinerja Guru Wanita di Sekolah Dasar, Jakarta", *Jurnal Teknodik Edisi*, No 10/VI/ Teknodik/Oktober/2002.
- Djojodipuro, Marsudi (1994), *Pengantar Ekonomi untuk Perencanaan*, Jakarta: UI Press.
- Firdausy, Carunia Mulya (1998) "Faktor-faktor Ekonomi dalam Penetapan Kebijaksanaan Persaingan yang Sehat", dalam Mahmud Thaha (penyunting) *Kebijaksanaan Persaingan Domestik. Penyunting Mahmud Thaha*, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PEP-LIPI). Jakarta: LIPI.
- Jusmaliani (1998), "Perusahaan Dominan dan Undang-undang Persaingan", dalam Mahmud Thaha (penyunting) *Kebijaksanaan Persaingan Domestik*, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PEP-LIPI), Jakarta: LIPI.
- KPPOD. 2002. *Pemeringkatan Daya Tarik Investasi*, 134 Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Medco (Mindanao Economic Development Council) (2004), "*Small and Medium Enterprises in Indonesia*", <http://www.medco.gov.ph/medcoweb/smeprofil.asp?SecDivID=IN> [24 Juni 2004]
- Pambudhi, Agung (2003), "Kebijakan Investasi Era Otonomi Daerah", *Buletin Kawasan*, Vol. 2, No. 2., Oktober 2003, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Deputi Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, BAPPENAS.
- Prasetyo, Djoko. 2004. *Membangun daya saing manajemen pemasaran pemerintah daerah pada era globalisasi*. <http://www.litbang.depdagri.go.id/artikel/Kajian3.htm> [30 Juli 2004]
- Primiana, Ina (2004), "Tantangan untuk memperbaiki Keterpurukan Industri Nasional, Daya Saing Isu Strategis Tahun 2004", *Pikiran Rakyat*, 6 Januari 2004.
- Putong, Iskandar (2002), *Ekonomi Mikro & Makro*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesastro, Hadi (2004), Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi dan Semuain Itu. *Economic Working Paper Series*. <http://www.csis.or.id/papers/wpe082> [19 Mei 2004].
- Supit, Antonius Joenoes (2004) "Otonomi Daerah dan Pelayanan Investasi Guna sMempercepat Pembangunan Kawasan Timur Indonesia", disampaikan pada Focus Group Discussion : Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Partisipatif, Pengembangan Ekonomi dan Kapasitas Daerah di Kawasan Timur Indonesia, 14-15 Januari 2004.
- UNCTAD, (2004). *World Investment Report, The Shift Towards Services*. United Nation Conference on Trade and Development.
- Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,, <http://www.bkpm.go.id>, diakses pada tanggal 10 April 2008

